

BAB IV

Proses Terbentuknya Output (Kebijakan Deforestasi Hutan) Oleh Perusahaan Asia Pulp and Paper

Setelah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai inputs support, maka di bab ini akan di bahas mengenai inputs demand. Dimana demand ini merupakan tuntutan yang diberikan untuk APP agar menerapkan *Zero Deforestation*. Tuntutan diberikan oleh Greenpeace dengan melakukan upaya-upaya dan aksi yang nyata. Setelah adanya tuntutan dan dukungan tersebut, APP sebagai subyek penelitian ini kemudian mengadakan sebuah pertemuan yang membahas mengenai penerapan kebijakan baru. Pertemuan ini hingga terbentuknya kebijakan *Zero Deforestation* termasuk dalam kategori proses dalam teori sistem. Setelah adanya proses, barulah terbentuk kebijakan yang kemudian akan diterapkan.

A. Proses Terbentuknya Kebijakan Konservasi Hutan APP

Beberapa penjelasan sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan konservasi hutan APP ini merupakan sebuah hasil konstruksi dari beberapa aktor yang memaksa APP untuk membuat sebuah kebijakan yang tentunya sedikit tidak menguntungkan perusahaan. Pasalnya APP dipaksa harus berhenti menggunakan kayu hutan alam sebagai bahan produksi kertas dan bubur kertasnya dan tentunya hal ini akan mengurangi kualitas hasil olahan produksi APP. Mengacu pada teori yang ada bahwa dalam skema teori sistem ada sebuah bagian dimana input di olah sehingga menghasilkan output yang disebut dengan proses. Kaitannya dengan

APP dalam hal ini adalah proses perumusan kebijakan yang di pengaruhi oleh beberapa input yakni intervensi dari pemerintah, INGO dan pasar.

Seperti yang telah di jelaskan dalam bagian landasan teoritis bahwa proses perumusan kebijakan konservasi hutan terdiri dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengidentifikasian masalah. Terkait dalam pengidentifikasian masalah APP tentu saja di bombardir berbagai kecaman dari berbagai pihak. Keterkaitan sejumlah aktor membantu merumuskan masalah yang terjadi akibat dari ulah APP. Greenpeace dan beberapa LSM baik nasional maupun internasional melakukan investigasi kelapangan untuk meneliti kegiatan yang dilakukan oleh APP, termasuk meneliti berbagai kesalahan yang dilakukan APP. Investigasi Greenpeace yang khusus difokuskan terhadap APP dimulai sejak 2010 di mulai dengan aksi kampanye terhadap penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh APP. Namun sebelum 2010, Greenpeace telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan kerusakan hutan akibat deforestasi dan pembalakan⁷⁰. Aksi Greenpeace ini disambut oleh masyarakat Internasional dan perusahaan yang terkait dengan rantai perusahaan APP. Aksi Greenpeace ini hanya sebatas monitoring dan melakukan kampanye, Greenpeace sebagai INGO tidak memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki wewenang pula untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kebijakan dalam penggunaan kawasan hutan. Namun, Greenpeace melakukan berbagai aksi dan kampanye yang mengajak langsung para INGO lainnya, masyarakat Internasional,

⁷⁰ Asia Tenggara, Greenpeace (2013). "Bagaimana Greenpeace Menghentikan Deforestasi di Indonesia". *Menuju Nol*

hingga pemerintah yang kemudian didukung oleh keluarnya Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelolala Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Instruksi ini dapat dikeluarkan juga dipengaruhi beberapa pihak, dalam rapatnya Presiden Indonesia yang dilakukakn pada September 2009 di Pittsburg itu disambut hangat oleh Negara G20 dan salah satunya bersedia untuk menyumbangkan dana agar rencana penurunan emisi gas rumah kaca ini dapat terealisasi⁷¹. Sasaran langsung dari instruksi ini adalah pemerintah daerah, Gubernur, Walikota, daerah setempat agar tidak lagi memberikan izin pembukaan lahan setelah Inpres ini diterbitkan. Dengan adanya penundaan pembukaan hutan alam ini, diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca serta pemerintah dapat membuat tata kelola hutan yang lebih baik lagi untuk menghentikan deforestasi.

Greenpeace terus melakukan aksi golbalnya dengan kampanye terhadap perusahaan yang memiliki kaitan dengan kerusakan hutan di Indonesia. Dari hasil kampanye Greenpeace membuahkan hasil yang terbilang cukup membantu dalam terbentuknya kebijakan APP. Pada April 2011, perusahaan Investor Mackenzie Financial Investment menjual saham APP yang ia miliki untuk umum. Pasalnya perusahaan ini menyatakan, bahwa ia tidak akan lagi mendanai APP hingga APP

⁷¹Briefing Paper, REDD Monitoring. (2011). “Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global <http://www.redd-monitor.org/> (diakses, 23 agustus 2016, 16.13)

benar-benar terbebas dari deforestasi⁷². Namun hal ini belum mendapatkan tanggapan positif dari APP. Pemutusan hubungan kerjasama terhadap APP tidak berhenti begitu saja. Di dalam tulisan ini, penulis hanya akan membahas beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerjasamanya dengan APP, dikarenakan terlalu banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan ini serta untuk memaksimalkan penelitian dan analisis data. Selanjutnya pada Juli 2011, perusahaan mainan bongkar pasang ternama juga memutus hubungan kerjasamanya, yaitu LEGO. LEGO pusat yang berada di Denmark menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan bahan produk kemasan yang dapat merusak hutan⁷³. Kebijakan LEGO ini berlaku untuk anak perusahaan mereka lainnya. Setelah LEGO, perusahaan mainan selanjutnya juga memutus hubungan kerjasamanya yaitu perusahaan boneka Barbie yang memiliki cakupan pemasaran produk cukup luas Mattel. Mattel telah menginstruksikan kepada pemasok untuk menghindari serat kayu dari sumber-sumber kontroversial, termasuk perusahaan "yang diketahui terlibat dalam deforestasi". Kebijakan mereka juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kertas daur ulang yang digunakan dalam bisnis mereka, serta untuk meningkatkan penggunaan produk kayu bersertifikat oleh Forest Stewardship Council (FSC)⁷⁴. Pada bulan November 2011, Hasbro yang merupakan produsen mainan terbesar pun memutus hubungannya

⁷²Feature Story. (2012). "Mackenzie Financial Investment Linked to Illegal Rainforest Destruction".<http://www.greenpeace.org/canada/en/recent/mackenzie-investments-rainforest-destruction/> (diakses 19 agustus 2016, 10.21)

⁷³LEGO *Banishes Asia Pulp and Paper Due to Deforestation Link*, op.cit (diakses 13 april 2015, 12.09)

⁷⁴Utami, Arie. (2011). "Berhasil: Barbie dan Mattel Akan Menghentikan Penghancuran Hutan Indonesia op.cit (Di unduh 30 april 2016, 14.08)

dengan APP. Hingga titik ini, APP belum juga memiliki inisiatif untuk mengeluarkan komitmennya untuk tidak merusak hutan. Maret 2012, National Geographic, Xerox, dan mondi juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan menggunakan produk APP lagi⁷⁵. Perusahaan yang memutus hubungan kerjasama dengan APP pun semakin berteambah, selanjutnya pada akhir Maret 2012 perusahaan pendanaan SKAGEN FUNDS juga menjual saham mereka yang ada di APP. SKAGEN menyatakan bahwa dirinya telah dirugikan hingga 25%⁷⁶. Jumlah yang ternilai cukup banyak untuk kalangan industry ini yang membuat SKAGEN akhirnya menghentikan kerjasamanya dengan APP. Pemutusan hubungan kerjasama yang berturut-turut ini akhirnya sedikit mempengaruhi APP. Sehingga pada 15 May 2012 APP mengumumkan inisiatif baru untuk menjadikan perusahaannya memiliki standar *High Conservation Value Resource Network* (HCVRN) . Salah satu INGO yang ikut berperan adalah *High Conservation Values Resource Network* (HCVRN) yang merupakan sebuah lembaga yang mengidentifikasi, mengawasi, dan memonitor *High Conservation Value* serta secara bersama-sama dengan *stakeholder* secara konsisten menjaga *High Conservation Value*. Selain HCVN, *Forest People Programe* (FPP) juga ikut andil sebagai tim penilai, bersama dengan HCVN, FPP menjadi bagian dari rapat pembentukan kebijakan konservasi hutan yang dilaksanakan oleh app guna penilaian rencana program yang akan di keluarkan⁷⁷.

⁷⁵ *Greenpeace*, 2013 “Menuju Nol, op.cit

⁷⁶ Quek, Calvin, loc.cit (diakses, 19 agustus 2016, 18.16)

⁷⁷ Notes on a meeting with APP 19 September 2012 (diakses, 25 Maret 2016)

Setelah mengumumkan pernyataan inisiatif baru ini, pihak APP merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan aktor-aktor yang terlibat atas penilaian ini. Langkah selanjutnya adalah merumuskan beberapa formulasi rencana program yang akan dilakukan dalam hal ini pemerintah dan INGO sangat berperan sebagai fungsi control sehingga formulasi yang akan dilakukan dapat dimonitoring dan evaluasi apakah formulasi tersebut sesuai dan dapat memecahkan masalah. APP membentuk sebuah divisi yang khusus menangani *Sustainability Program*. Bagian tersebut di kepalai oleh Aida Greenbury, dan melakukan Pertemuan pertama pada 19 September 2012 dengan perwakilan dari HCVRN (*High Conservation Values Resource Network*) yaitu Marcus Colchester sebagai Wakil Ketua HCVRN serta sebagai Direktur FPP (*Forest People Programme*). Elim S sebagai deputy CEO Sinar Mas bagian Kehutanan, Dewi Bramono sebagai deputy direktur divisi *sustainability* APP dan Ketua Proyek *Sustainability Road Map* serta team penilai *High Conservation Values*. (HCV) bergabung ke dalam rapat tersebut. Secara keseluruhan pertemuan menghasilkan lima point penting yang pertama Pre-Assesment (masih dalam proses), yang kedua Finalising TORs untuk penilaian secara keseluruhan yang ketiga *carry out assessment with parallel stakeholders engagement process*, keempat *Final Report* untuk seluruh peserta meeting dengan target *deadline* sampai dengan kuartar ketiga tahun 2013.

Sebelum pertemuan yang dilakukan oleh APP dan tim penilai, pemutusan hubungan kerjasama dengan APP bertambah lagi. Pada bulan Juli, KFC Indonesia mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi membeli produk kemasan yang

berasal dari APP⁷⁸. Tepat setelah sebulan dari pertemuan APP dengan tim penilai tersebut, masih bertambah lagi pemutusan hubungan kerjasama terhadap APP. Kali ini pemutusan hubungan dilakukan oleh 2 perusahaan yang terbilang cukup besar dan memiliki pengaruh juga, yaitu KFC UK yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membeli dari APP pada bulan Oktober 2012, serta komitmen KFC ini juga diserukan kepada seluruh KFC yang berada di Negara Inggris dan sekitarnya⁷⁹. Disusul dengan perusahaan ternama lainnya yaitu Walt Disney pusat yang berlokasi di Los Angeles juga menyatakan pemutusan hubungan kerjasamanya dengan perusahaan pemasok kertas APP⁸⁰. Hingga titik ini, pemutusan hubungan kerjasama tentunya mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi APP. Perusahaan ini telah kehilangan banyak perusahaan yang menjadi tujuan dari produksinya. Hal ini merupakan tamparan yang keras bagi APP, sehingga ia harus segera mengambil tindakan lebih awal agar tidak kehilangan perusahaan kerjasamanya lagi serta dapat menarik kembali perusahaan yang sebelumnya telah bekerja sama dengannya. Karena bisnis APP ini termasuk bisnis berkelanjutan yang akan dilakukan dengan sistem kontrak yang berlanjut.

Tahap selanjutnya adalah pengesahan program. Dalam rapat formulasi program setiap divisi yang ada diberikan deadline untuk memperbaiki program yang dirasa belum memenuhi kriteria. Setelah pengumpulan berkas akhir, proses

⁷⁸Saturi, Sapariah. (2012). Loc.cit (20 juli 2015, 21.19)

⁷⁹Wihardandi, Aji. (2012). "KFC Inggris Raya Tak Gunakan Lagi Kertas Asia Pulp and Paper Karena Rusak Hutan Indonesia", Loc.cit (diakses, 20 agustus 2016, 23.20)

⁸⁰Wihardandi, Aji. (2012). "Walt Disney Tinggalkan Produk Asia Pulp and Paper Karena Rusak Hutan Indonesia". <http://www.mongabay.org/> (Di unduh 30 april 2016, 21.09)

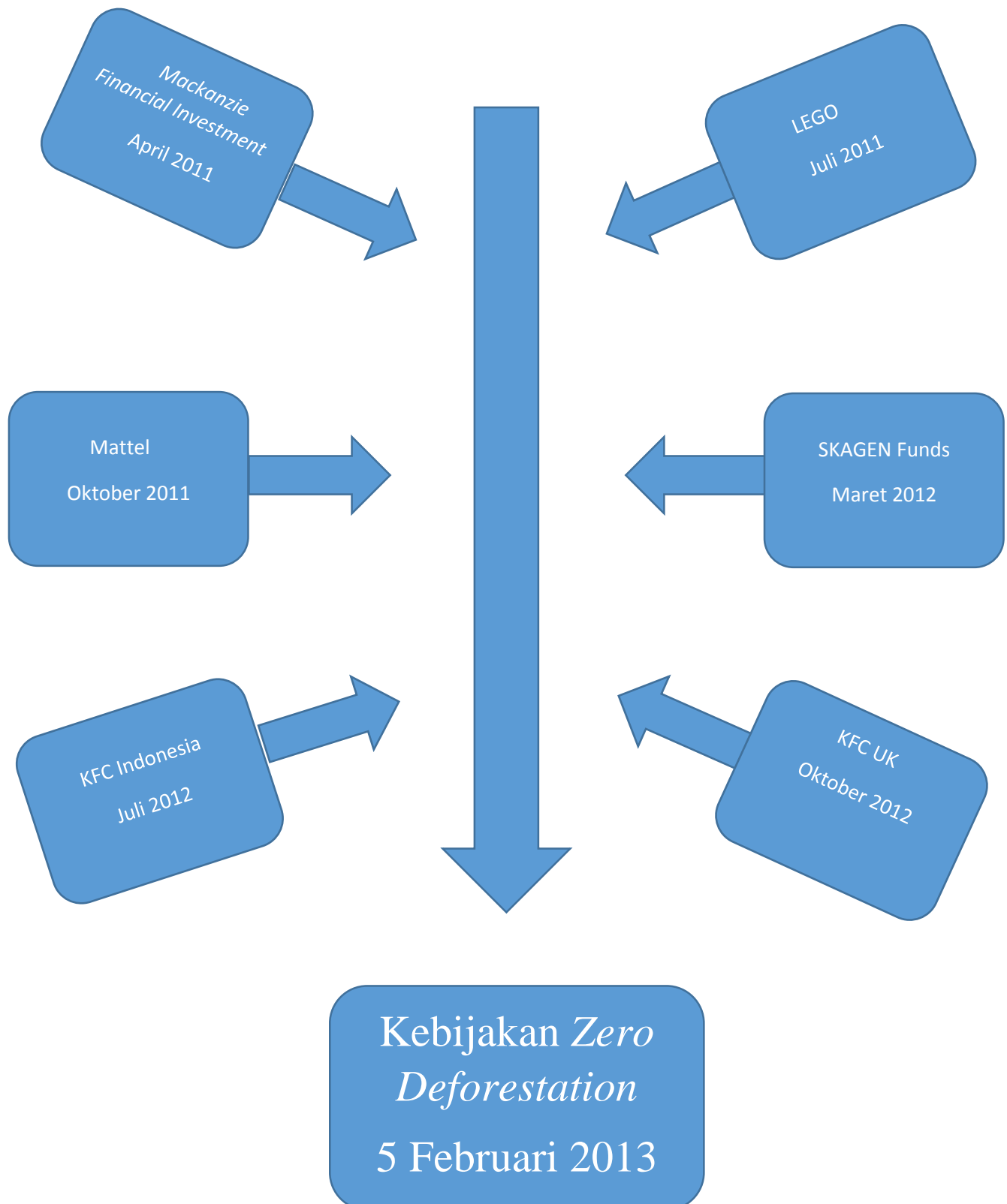
yang dilakukan adalah pengesahan atau finalisasi program yang artinya program tersebut dapat diumumkan kepada public yang sebelumnya telah mendapatkan hasil akhir dari rapat stakeholder. Setelah mendapatkan hasil tersebut, secara resmi APP mengumumkan kebijakan atau putusan akhir yang telah disepakati yaitu Konservasi Hutan dengan *Zero Deforestation*. Keputusan akhir yang dikeluarkan pada 5 Februari 2013 itu dinyatakan pada pertemuan yang diadakan oleh APP pada tanggal 28 Januari 2013. Pertemuan ini dilakukan setelah melakukan penilaian-penilaian dari hasil rapat yang dilakukan pada 19 September 2012. Pertemuan akhir ini dihadiri oleh perwakilan dari APP, Sinar Mas Forestry, HCVRN, FPP, TFT, APCS, serta Ecologica sebagai konsultan HCV. Dalam pertemuan ini membahas hasil penilaian dari tim HCV, kemudian Aida Greenbury sebagai kepala program ini menyatakan bahwa APP akan mengumumkan kebijakan barunya pada 5 Februari 2013⁸¹. Padahal pada pertemuan pertama, waktu untuk menilai dan memutuskan komitmen baru diberikan deadline hingga kuartar ketiga tahun 2013. Namun pada 28 Januari sudah dilakukan lagi pertemuan oleh aktor-aktor yang sebelumnya terlibat dengan penambahan beberapa aktor penting lainnya. Lebih cepat beberapa bulan dari waktu yang ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa APP telah kebingungan karena kehilangan banyak perusahaan yang bekerja sama dengannya sekaligus para Investor Asing untuk perusahaannya. Sehingga APP harus lebih cepat membuat strategi baru agar tidak kehilangan perusahaany lainnya lagi serta dapat mengajak kembali perusahaan yang telah memutus hubungan kerjasamanya

⁸¹Note On Meeting APP and APCS 23 January 2012

dengan komitmen baru mereka. Namun tidak sampai disitu saja, APP kemudian harus mengimplementasi kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi, INGO dan Pasar kembali mengambil peran sebagai pengontrol atau sebagai aktor yang melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana implementasi Kebijakan Konservasi Hutan dilaksanakan oleh APP. Sampai saat ini (2016) APP masih dalam proses implementasi program, dan berbagai INGO dan Pasar APP bergerak sebagai pemantau atau pengontrol kebijakan tersebut.

Berikut adalah diagram fishbone process tekanan pasar terhadap Asia Pulp

and Paper :



Berdasarkan pada teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dapat dijelaskan keterkaitan antara Pemerintah, INGO (International Non-Government Organization), dan Pasar (Pelanggan APP) terhadap APP. Ketiga Aktor tersebut memiliki pengaruh terhadap APP dalam pengambilan keputusan. Pemerintah berperan sebagai regulator yang membuat peraturan dalam pengelolaan hutan sehingga APP secara langsung terikat dengan peraturan tersebut. Namun peran pemerintah disini hanya sebagai pembuat kebijakan, tidak langsung menegakkan APP untuk menghentikan kerusakan hutan. Kebijakan atau putusan yang dikeluarkan pemerintah ini, setidaknya cukup membantu agar perluasan lahan hutan tidak bertambah. INGO berperan sebagai badan pengawas yang selalu memperhatikan gerak langkah APP dalam mengeksploitasi hutan sehingga APP selalu merasa diawasi yang mempengaruhi setiap keputusan yang akan di buat, karena apabila melakukan kesalahan, INGO menekan APP dengan cara melakukan aksi kampanye yang menyerukan terhadap perusahaan kerjasama APP. Hal ini akan berpengaruh pada citra APP sebagai sebuah perusahaan raksasa dan secara tidak langsung juga berpengaruh pada stabilita perusahaan. Pasar berperan sebagai ujung tombak berdirinya perusahaan. Tanpa Pasar tentunya perusahaan manapun akan mati, begitu juga dengan APP yang sangat membutuhkan pasar sebagai ujung tombak berdirinya perusahaan, sehingga apapun yang akan terjadi dengan APP tentu saja tidak dapat mengabaikan peran pasar sebagai aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian keterlibatan ketiga aktor tersebut dalam keluarnya Kebijakan Konservasi Hutan sudah sangat jelas bahwa mereka memiliki *power*

“memaksa” APP untuk membuat sebuah kebijakan yang tentunya akan berdampak besar pada masing-masing aktor. Dapat dikatakan juga bahwa ketiga aktor tersebut yaitu Pemerintah, INGO, dan Pasar menjadi faktor utama dalam keluarnya Kebijakan Konservasi Hutan APP. Maka terjawab sudah pertanyaan penelitian dalam tulisan ini bahwa faktor yang mempengaruhi keluarnya Kebijakan Konservasi Hutan oleh APP di pengaruhi oleh **Pertama**, keterlibatan pemerintah sebagai regulator atau pembuat aturan, yang memutuskan dan membuat kebijakan baru untuk menekan APP agar tidak lagi melakukan penebangan hutan Alam dan pembukaan lahan hutan di Indonesia. Namun usaha pemerintah ini tidak sepenuhnya berpengaruh secara langsung terhadap APP. Hanya membantu untuk menunda terjadinya perluasan perizinan pembukaan hutan alam. **Kedua**, keterlibatan INGO (dalam hal ini Greenpeace) sebagai motor pengawas pergerakan APP yang juga memaksa APP menghentikan aksi penebangan hutan alam dengan cara melakukan tekanan berupa Investigasi, Kampanye, dan aksi lainnya yang kemudian membuat citra perusahaan APP di mata Internasional buruk. Hal ini kemudian mendorong perusahaan yang melakukan kerjasama dengan APP untuk membatalkan kerjasamanya dengan APP. **Ketiga**, yakni peran Pasar yang pada akhirnya juga memaksa APP untuk menghentikan aksinya dengan cara memboikot seluruh produk APP dan menghentikan kerjasamanya jika masih melakukan penebangan hutan alam. Pasar inilah yang menekan secara langsung bagaimana APP akhirnya memikirkan untuk membuat kebijakan ini agar lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya. Agar tidak bertambah lagi perusahaan yang menghentikan kerjasama dengan APP.

A. Kebijakan Zero Deforestation Oleh Asia Pulp & Paper

Pada tanggal 5 Februari 2013, APP mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan, yang termasuk segera menghentikan pembukaan hutan alam di seluruh rantai suplai.⁸² APP juga mengungkapkan kemitraan dengan organisasi non-profit *The Forest Trust*, yang membantu perusahaan dengan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) penilaian untuk mengidentifikasi wilayah hutan untuk perlindungan. TFT bekerja dengan APP dan Greenpeace untuk mendesain Kebijakan Konservasi Hutan APP dan akan memantau dan melaporkan progress APP untuk mencapai komitmennya. Selain itu, Kebijakan APP khusus menyambut pengamat pihak ketiga untuk memverifikasi implementasi - yang pertama untuk APP dan untuk industri. Berikut merupakan isi kebijakan konservasi hutan yang dikutip langsung dari surat edaran kebijakan konservasi hutan yang dikeluarkan oleh APP⁸³ :

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.

⁸² Butler, Rhett (5 February 2013). "The beginning of the end of deforestation in Indonesia?". <http://www.mongabay.co.id/repot> (diakses, 13 november 2015)

⁸³ Surat Edaran Kebijakan Konservasi Hutan oleh APP 1 februari 2013

- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengkategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses

produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.

- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.
- Komitmen APP ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.
- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

Kebijakan Komitmen 3: Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan yang bertanggung jawab Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

Dimana ada pengajuan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang baru, APP akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk juga pengakuan terhadap hak atas tanah adat. APP telah berkomitmen terhadap penilaian HCVF yang independen sebagai bagian dari komitmen ini dan dengan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, akan mengembangkan langkah-langkah lanjutan untuk menerapkan FPIC. APP akan berkonsultasi dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa protokol dan

prosedur FPIC dan resolusi konflik yang dimilikinya telah sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Kebijakan Komitmen 4: Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

Sebagai hasil dari pengumuman rencana *Zero Deforestation*, Greenpeace, Rainforest Action Network dan LSM lainnya menyatakan optimisme hati-hati dan menyambut Kebijakan Konservasi Hutan perusahaan.⁸⁴ Greenpeace juga sepakat untuk menghentikan kampanye global melawan APP dan menyelenggarakan diskusi terbuka untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan kebijakan.

⁸⁴Sutherland, Laurel (2013). "Rainforest Action Network Responds to Asia Pulp and Paper's New Forest Commitments". *Rainforest Action Network*.